



2015

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA****B1**

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 1 Juni 2015 No. 44

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

**PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(Perubahan atas Laporan Harta Kekayaan yang dilaporkan sebelumnya)****BIDANG : EKSEKUTIF****LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT****I. DATA PRIBADI**

1. Nama : H. PERY SOEPARMAN, S.H., M.M., M.Si.
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 19416
4. Alamat Kantor : Jl. SURAPATI NO. 4, BANDUNG
5. Tanggal Pelaporan : 31 Januari 2003, 4 April 2014

## Status Laporan

**II. DATA HARTA****A. HARTA TIDAK BERGERAK  
(TANAH DAN BANGUNAN)**

	31 Januari 2003	4 April 2014
	Rp. 674.289.000	Rp. 1.983.404.000
1. Tanah & Bangunan seluas 251 m2 & 182 m2, di Kota BOGOR, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1997 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 268.112.000	----
2. Tanah seluas 240 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1998 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 30.720.000	----
3. Tanah seluas 285 m2, di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1999 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 10.260.000	----

19416		Status Laporan	
		31 Januari 2003	4 April 2014
4.	Tanah seluas 800 m2 , di Kabupaten BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2002 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 102.400.000	----
5.	Tanah & Bangunan seluas 360 m2 & 419 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2011 (Penambahan Data Baru )	----	Rp. 1.983.404.000
6.	Tanah & Bangunan seluas 225 m2 & 67 m2, di Kota BANDUNG, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 2000 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 188.693.000	----
7.	Tanah & Bangunan seluas 96 m2 & 40 m2, di Kota BOGOR, yang berasal dari HASIL SENDIRI , perolehan tahun 1991 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 78.104.000	----
<b>B. HARTA BERGERAK</b>			
<b>a. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN LAINNYA</b>		Rp. 215.000.000	Rp. 412.100.000
1.	Mobil, merk ---, tahun pembuatan 2013, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2013 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 204.100.000
2.	Mobil, merk ---, tahun pembuatan ---, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2006 (Penambahan Data Baru)	----	Rp. 208.000.000
3.	Mobil, merk TOYOTA COROLLA, tahun pembuatan 1996, yang berasal dari HIBAH, perolehan tahun 1996 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 90.000.000	----
4.	Mobil, merk TOYOTA KIJANG, tahun pembuatan 2001, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2001 (Penghapusan Data Karena Dijual)	Rp. 125.000.000	----

19416

Status Laporan

31 Januari 2003

4 April 2014

	31 Januari 2003	4 April 2014
<b>b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA</b>		
<b>c. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp. 21.690.000	Rp. 21.690.000
1. LOGAM MULIA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 1992	Rp. 18.340.000	Rp. 18.340.000
2. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1995 sampai dengan 2002	Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
3. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HIBAH, perolehan dari tahun 1993 sampai dengan 1997	Rp. 1.600.000	Rp. 1.600.000
<b>C. SURAT BERTERIMA</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA</b>	Rp. 30.254.527	Rp. 30.254.527
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI	Rp. 30.254.527	Rp. 30.254.527
<b>E. PIUTANG</b>	Rp. 0	Rp. 0
<b>TOTAL HARTA (II)</b>	Rp. 941.233.527	Rp. 2.447.448.527
<b>III. HUTANG</b>		
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN ( II - III )</b>	Rp. 941.233.527	Rp. 2.447.448.527

19416

Status Laporan

31 Januari 2003

4 April 2014

MENGETAHUI,  
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN  
DEPUTI

Jakarta, 23 Oktober 2014  
DIREKTORAT PENDAFTARAN  
DAN PEMERIKSAAN LHKPN  
PLH. DIREKTUR

TTD  
JOHAN BUDI S.P.

TTD  
RIKA KRISDIANAWATI

---

Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terakali tidak pidana.